Pesantren's Strategy in Implementing Vocational Education Policy Through Vocational Training Centers (VTC)

Strategi Pesantren dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK)

Lingga Fahrurrosi^{1*}, Khoridatul Bahiyah² and Nurmila Binti Marzuki³

^{1,2} Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia; linggafahrurrosi@gmail.com,
ridakharidah@gmail.com

³ Universitas Sultan Zainal Abidin, Malaysia; marzuginurmila@gmail.com

* Correspondence: linggafahrurrosi@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of vocational education policy at Miftahul Ulum Islamic Boarding School in Gondanglegi, Malang. The research is significant due to unemployment issues and the mismatch between education and the job market, which highlight a weak vocational policy implementation within the unique and under-researched context of pesantren. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, and then validated with source triangulation. The data analysis followed an interactive model, including data reduction, display, and conclusion drawing. Findings show that the school's Community Vocational Training Center (VTC) focuses on Visual Communication Design (VCD). This specialization is strategic, as it is highly relevant and supported by competent internal staff. The curriculum emphasizes mastering Corel Draw software, with graduation standards based on project completion. Graduates further develop skills through external internships. However, this VTC faces challenges like inadequate operational funding, a lack of supervision, and structural management issues. To address these, the management plans to reorganize its administration and forge new partnerships to more effectively place graduates in the workforce.

Keywords: Vocational Education, Islamic Boarding Schools, Vocational Training Centers, Visual Communication Design

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pendidikan vokasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Gondanglegi, Malang. Studi ini penting karena berangkat dari problematika pengangguran dan ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, yang menunjukkan implementasi kebijakan vokasi masih tergolong lemah dipadukan dengan karakteristik unik pesantren dan minimnya penelitian serupa. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, yang kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi sumber. Analisis data dilakukan secara interaktif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Miftahul Ulum mengimplementasikan pendidikan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dengan fokus pada keahlian Desain Komunikasi Visual (DKV). Pemilihan DKV dianggap strategis karena relevan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia internal yang kompeten. Kurikulum pelatihan berpusat pada penguasaan perangkat lunak Corel Draw, dengan standar kelulusan berupa penguasaan materi dan penyelesaian proyek akhir. Lulusan BLK ini kemudian mengembangkan kemampuannya melalui program magang dengan mitra eksternal. Meskipun demikian, BLK ini menghadapi beberapa tantangan, seperti pendanaan

operasional yang kurang memadai, kurangnya monitoring dari atasan, dan masalah struktural dalam pengelolaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pengelola berencana merapikan kepengurusan, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk menyalurkan lulusan dengan lebih masif.

Kata Kunci: Pendidikan Vokasi, Pondok Pesantren, Balai Latihan Kerja, Desain Komunikasi Visual

1. PENDAHULUAN

Pengangguran menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia (Hasibuan, 2023). Ketidakstabilan tingkat kemiskinan mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat masih belum tercapai secara konsisten (Mufida & Nasir, 2023). Data dari BPS sebagai mana yang dikutip oleh (Maulana et al., 2025) menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka usia produktif cenderung stagnan atau meningkat setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja (Susianita et al., 2024), di mana lulusan pendidikan formal banyak yang belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja (Utomo, 2021).

Dalam hal ini, implementasi kebijakan menjadi hal penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dalam kamus Webster, implementasi dipahami sebagai proses menyediakan sarana untuk bertindak dan menghasilkan dampak nyata (Sofiyanti & Pramono, 2024). Sedangkan istilah kebijakan dimaknai sebagai langkah terarah dalam mencapai tujuan serta menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan sumber daya dalam jangka waktu tertentu (Mansur, 2021). Dalam konteks pendidikan, dipahami bahwa kebijakan pendidikan merupakan kumpulan aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, termasuk tujuan dan cara pencapaiannya (Dwi et al., 2024). Salah satu bentuk kebijakan yang strategis dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan dan keterampilan kerja adalah pendidikan vokasi (Maulida et al., 2025).

Pendidikan vokasi sendiri merupakan pendidikan formal yang berorientasi pada dunia kerja, dengan penekanan pada bidang-bidang khusus yang membutuhkan keterampilan teknis serta kemampuan praktis (Kalita, 2024; Liu & Paramalingam, 2025). Pendidikan vokasi diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dunia kerja, berbasis kompetensi, inklusif, dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat (Pemerintah Indonesia, 2022). Sesuai Pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan keahlian terapan hingga setara dengan program sarjana (Rembangsupu et al., 2022).

Pendidikan vokasi membekali keterampilan sesuai industri (Ari et al., 2025), didukung kebijakan pemerintah seperti revitalisasi SMK dan peningkatan mutu pelatihan (Erlinda & Noviani, 2021). Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya memenuhi harapan. Ironisnya, lulusan dari jenjang vokasi justru menyumbang angka tertinggi dalam pengangguran terbuka (Utomo, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vokasi masih tergolong lemah.

Pesantren, yang dikenal sebagai lembaga pendidikan berasrama tempat santri mendalami ajaran Islam melalui kitab kuning (Hidayah, 2021), mengambil peran strategis dalam membina karakter sekaligus mengembangkan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal (Ali & Bahtera, 2024; Chuanchen & Zaini, 2023). Ini tentu merupakan sebuah potensi besar, dan apalagi alih-alih hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, lebih dari itu Pondok Pesantren merupakan tempat pembiasaan dan habituasi (Fahrurrosi & Husni, 2024), sehingga tidak berlebihan jika Pondok Pesantren berpotensi besar dapat memaksimalkan kebijakan ini. Namun demikian, dalam konteks ini, Hilyatin menekankan bahwa penguatan pendidikan vokasi di lingkungan pesantren perlu mencakup kemitraan dengan industri, penerapan standar nasional, peningkatan

kompetensi pendidik, serta dukungan melalui riset kolaboratif (Hilyatin, 2020; Mohsen et al., 2022).

Salah satu tantangan utama dalam penguatan vokasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten sesuai perkembangan teknologi, terutama dalam menghadapi era Industri 4.0 (Basuki et al., 2024; Qian, 2024; Rama et al., 2023). Sebagai salah satu contoh, Implementasi pendidikan vokasi di Jawa Timur terkendala oleh komunikasi, koordinasi, dan kualitas SDM yang belum optimal (Maharani et al., 2024). India menilai pendidikan vokasi penting, namun perkembangannya tetap lambat meski ada NEP 2020 (Sharma et al., 2024). Negara-negara seperti Jerman, Austria, Jepang, dan Swiss telah berhasil mengembangkan sistem vokasi yang kuat, yang kini menjadi rujukan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia (Meditama, 2021).

Dalam konteks penguatan pendidikan vokasi, sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi pendidikan vokasi di berbagai lembaga pendidikan, meskipun belum banyak yang menyoroti konteks pesantren secara spesifik. Antara lain seperti penelitian oleh Dahalan, Alias, dan Shaharom menunjukkan bahwa gamifikasi dan game-based learning memiliki dampak positif terhadap motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar peserta didik vokasional. Melalui kajian sistematis terhadap 17 studi, ditemukan bahwa penggunaan platform digital dan simulasi interaktif semakin berkembang di Asia sejak 2020, terutama di bidang teknik dan kesehatan. (Dahalan et al., 2024) Namun, kajian ini masih terbatas pada pendidikan vokasi formal dan belum menyentuh konteks pesantren yang memiliki karakteristik unik dalam pengembangan keterampilan.

Penelitian lain yang sama mengkaji seputar kebijakan Pendidikan Vokasi ini adalah (Tian et al., 2023) yang memetakan perkembangan penelitian pendidikan vokasi dan pelatihan (Vocational Education and Training/VET) dari tahun 2004 hingga 2020 melalui pendekatan bibliometrik berbasis perangkat lunak *CiteSpace*. Hasilnya menunjukkan bahwa kajian pendidikan vokasi telah berkembang menjadi bidang yang interdisipliner, melibatkan ilmu psikologi, sosiologi, ekonomi, dan pedagogi. Penelitian ini juga mengungkap bahwa topik-topik seperti keterlibatan, program vokasi, self-efficacy, dan kesiapan pasar tenaga kerja menjadi tren utama dalam riset VET global. Namun, fokus penelitian masih didominasi oleh negara-negara Barat dan belum banyak menyoroti konteks lokal seperti pesantren di Indonesia

Studi lain yang juga menyorot pendidikan vokasi yaitu studi oleh (Li & Pilz, 2023) dimana pada penelitian itu yang dibicarakan adalah isu tentang transfer kebijakan pendidikan vokasi antarnegara. Penelitian ini mengulas pendekatan dari berbagai disiplin seperti ekonomi politik komparatif, manajemen sumber daya manusia internasional, dan kajian pendidikan komparatif. Temuan mereka menunjukkan bahwa keberhasilan transfer kebijakan pendidikan vokasi sangat dipengaruhi oleh sensitivitas budaya, kemampuan adaptasi lokal, dan perencanaan jangka panjang. Kajian ini memberikan wawasan penting bahwa meskipun pendidikan vokasi dapat ditransfer secara internasional, penerapannya harus mempertimbangkan konteks budaya dan institusional yang spesifik. Hal ini relevan dalam upaya mengadaptasi kebijakan vokasi ke dalam sistem pendidikan pesantren.

Selanjutnya, penelitian dengan nada yang sama juga dilakukan oleh Deissinger dan Gonon pada penelusuran perkembangan dan fondasi budaya dari sistem vokasi dual (*apprenticeship*) di Jerman dan Swiss. Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem vokasi di kedua negara tersebut sangat dipengaruhi oleh konsep budaya pendidikan (*Bildung*), serta legitimasi historis konsep *Beruf*—yaitu integrasi antara pekerjaan dan pendidikan (Deissinger & Gonon, 2021). Penekanan pada pembentukan institusi pendidikan vokasi yang kuat menjadi kunci utama dalam keberlanjutan sistem vokasi dual.

Yuliani Fitri dkk. menunjukkan bahwa sistem vokasi Indonesia masih fleksibel tanpa jalur berkelanjutan, sedangkan Belanda menerapkan jalur terstruktur sejak dini melalui VMBO (*Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs*) dan MBO (*Middelbaar Beroepsonderwijs*), sehingga lebih efektif mencetak lulusan siap kerja (Fitri et al., 2024). Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan vokasi sejak awal yang terintegrasi dan selaras dengan kebutuhan industri.

Kelima penelitian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun pendidikan vokasi telah berkembang secara global, kajian yang menelaah implementasinya dalam sistem pendidikan pesantren masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap implementasi kebijakan pendidikan vokasi di lingkungan pesantren—yang memiliki karakteristik khas dalam hal kurikulum, nilai keagamaan, dan sistem kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual mengenai bagaimana pesantren, sebagai lembaga pendidikan nonformal berbasis agama, mampu mengadaptasi kebijakan pendidikan vokasi secara kontekstual dan berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum IV (RU4), Ganjaran, Gondanglegi, Malang sebagai studi kasus untuk mengkaji pelaksanaan pendidikan vokasi di lingkungan pesantren, wujud nyata dari pendidikan vokasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum (RU4) ini adalah melalui Balai Latihan Kerja (BLKK) dengan fokus keahlian pada bidang Desain Komunikasi Visual (DKV). Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi kebijakan pendidikan vokasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum IV (RU4), dan apa saja peluang serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi kebijakan pendidikan vokasi di pesantren tersebut, serta mengidentifikasi berbagai peluang yang dapat dikembangkan dan tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaannya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dengan menerapkan metode studi kasus, penelitian berfokus untuk mengkaji secara komprehensif implementasi kebijakan pendidikan vokasi dalam konteks spesifik Pondok Pesantren Miftahul Ulum (RU4) Malang. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan rinci mengenai bagaimana kebijakan tersebut diinterpretasikan, diadaptasi, dan dilaksanakan di tingkat operasional pesantren, serta untuk mengungkap dinamika, tantangan, dan faktor-faktor pendukung yang muncul dalam proses implementasinya.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode triangulasi untuk memastikan kedalaman dan validitas informasi. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat langsung dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Pondok Pesantren Miftahul Ulum (RU4). Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk mengamati secara langsung proses dan aktivitas terkait implementasi kebijakan pendidikan vokasi di lingkungan pesantren. Terakhir, analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai arsip dan regulasi yang relevan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi (Ardiansyah et al., 2023).

Selanjutnya, Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman. Model ini melibatkan tiga tahapan utama yang saling terkait: dimulai dengan reduksi data untuk memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah agar lebih mudah dikelola; dilanjutkan dengan penyajian data, di mana data yang telah direduksi disajikan dalam

bentuk yang terorganisir seperti narasi, matriks, atau bagan untuk memfasilitasi pemahaman; dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi dan perumusan makna dari data yang tersaji. Untuk memastikan keabsahan data yang tinggi dan meminimalisir bias peneliti, strategi triangulasi diterapkan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber atau metode. Selain itu, konfirmasi langsung kepada informan kunci juga dilakukan secara berkala untuk memvalidasi temuan dan interpretasi peneliti (Miles & Huberman, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Pondok Pesantren dalam Membentuk SDM Santri

Pondok pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan Islam yang mendalam dan unik, melekat kuat sebagai bagian integral dari subkultur masyarakat Indonesia. Sejak dahulu kala, pesantren telah mengambil peran sentral dalam upaya mencerdaskan bangsa, sebuah dedikasi yang terus berlanjut tanpa henti. Keberadaannya terbukti vital, terutama pada masa-masa sulit perjuangan melawan kolonialisme, di mana pesantren menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan dan berfungsi sebagai pusat studi yang mampu bertahan serta relevan hingga masa kini. Ciri khas pesantren terletak pada sistem asrama atau pondoknya, dengan kiai sebagai figur sentral yang menjadi panutan, masjid sebagai pusat spiritual yang menjiwai seluruh kegiatan, serta pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai sebagai inti utama aktivitas santri.

Dalam konteks ini, institusi pesantren sangatlah esensial dalam mencetak generasi pemimpin dan penerus yang tidak hanya dibekali dengan ilmu-ilmu keagamaan sebagai bekal kehidupan akhirat, tetapi juga semakin adaptif dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan praktis dan relevan dengan tuntutan dunia, sehingga para santri memiliki kapasitas holistik untuk keberlangsungan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat (Rohdiana et al., 2023).

Dari sini menjadi jelas bahwa peran sentral pondok pesantren pada hakikatnya adalah bagaimana upaya untuk membentuk dan menghasilkan sumberdaya manusia yang tidak hanya cakap pada bidang ilmu agama saja, namun juga memiliki keterampilan praktis untuk menunjang kesuksesan hidup di dunia. Sudah barang tentu bahwa pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dan upaya peningkatan kompetensi santri sebagai bekal untuk mengarusi kehidupan di masa depan tidak bisa dilakukan tanpa melalui proses pembelajaran dan pelatihan yang sistematis (Basari et al., 2023) di satu sisi, serta dukungan dari berbagai mitra baik dari pihak internal yaitu sistem Pendidikan di pondok pesantren yang bersangkutan maupun dari pihak-pihak eksternal secara umum, dan secara khusus yaitu penentu kebijakan, yang dalam hal ini adalah pemerintah.

3.2. Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Vokasi

Berdasarkan landasan hukum yang ada, implementasi pendidikan vokasi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelatihan Kerja. Kedua peraturan ini menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengklasifikasikan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja sebagai bagian dari pendidikan non-formal, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 secara khusus mengatur pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar kerja melalui sertifikasi kompetensi dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri.

Landasan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Perpres ini

mempertegas pentingnya pendidikan vokasi dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja dan meningkatkan produktivitas industri. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Perpres ini menetapkan target untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan vokasi hingga 60% pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta melakukan evaluasi berkala. Harapannya, upaya ini dapat memberikan dampak signifikan bagi pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Avana et al., 2023).

Gambar 1. Peta Kebijakan Pendidikan Vokasi

Sebagaimana yang di potret oleh laporan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2015 Indonesia memiliki lima tipe utama pendidikan vokasi, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Akademi Komunitas, Politeknik, program vokasi di universitas, dan Balai Latihan Kerja (BLK) (Suriagiri & Assyauqi, 2023). Institusi-institusi ini berada di bawah pembinaan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Keterlibatan banyak kementerian ini didorong oleh ambisi pemerintah untuk mengubah rasio siswa pendidikan vokasi dan akademik menjadi 60:40. Meskipun pada tahun 2012 rasionya masih 49:51, jumlah SMK di Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dari 10.256 menjadi 11.727 sekolah. Dari jumlah tersebut, 57% berlokasi di Jawa, 20% di Sumatera, dan sisanya tersebar di wilayah lain, dengan lebih dari 70% di antaranya merupakan sekolah swasta yang menampung lebih banyak siswa.

Selanjutnya pada tahun 2017 Pemerintah meluncurkan program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas) dengan mendirikan 50 unit pelatihan. Inisiatif ini kemudian diperluas dengan membangun 75 unit tambahan pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 direncanakan pendirian 1.000 lembaga baru. Pada tahap awal tahun 2019, sekitar 500 BLK Komunitas ini dibangun di berbagai lembaga pendidikan keagamaan,

seperti pondok pesantren dan seminari, di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah agar pelatihan yang diberikan selaras dengan potensi ekonomi lokal, sehingga lulusan dapat dengan mudah terserap oleh industri atau memiliki motivasi untuk membangun usaha sendiri (Ahmad & Putra, 2022).

Balai Latihan Kerja Komunitas adalah pusat pelatihan yang didirikan untuk membekali anggota komunitas dan lulusan pesantren dengan keterampilan vokasi dan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelatihan, pemerintah memberikan bantuan berupa pembangunan satu unit fasilitas kerja lengkap dengan semua sarana dan prasarananya. Bantuan ini juga mencakup penyediaan satu set peralatan pelatihan, dana operasional, dua paket program pelatihan, serta program pengembangan bagi para instruktur dan pengelola (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2025).

Distribusi Jenis LPK (Semester I 2024)

Gambar 2. Peta Distribusi LPK

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan terbaru dengan merujuk pada pada Semester I tahun 2024, Indonesia memiliki total 6.365 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Dari keseluruhan jumlah tersebut, lebih dari separuhnya, atau sekitar 55,71 persen, merupakan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Sementara itu, LPK Swasta menjadi kontributor terbesar kedua dengan porsi sebesar 38,04 persen. Sisa persentase diisi oleh berbagai jenis lembaga pelatihan pemerintah lainnya, seperti BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), BLK Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN), Lembaga Pelatihan Kementerian/Lembaga (K/L), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait status kualitasnya, hanya sekitar 20,42 persen dari seluruh LPK yang telah mendapatkan akreditasi resmi. Ini berarti sebagian besar lembaga, yaitu sekitar 79,58 persen, belum memiliki status akreditasi.

3.3. Strategi Pondok Pesantren dalam Implementasi Pendidikan Vokasi

Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Yayasan KH As'ad Ismail yang diresmikan pada 07 Oktober 2024 menerapkan strategi pendidikan vokasi dengan memilih program Desain Komunikasi Visual (DKV). Pemilihan bidang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa DKV merupakan vokasi yang baru, memiliki orientasi masa depan, serta relevan dengan kebutuhan industri kreatif digital. Keputusan ini juga ditopang oleh ketersediaan desainer mumpuni di internal pondok pesantren, sehingga proses rekrutmen instruktur tidak menjadi kendala.

Strategi ini sejalan dengan pandangan Li dan Pilz yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan vokasi sangat bergantung pada kemampuan adaptasi lokal terhadap kebutuhan industri dan sensitivitas budaya (Li &

Pilz, 2023). Keberhasilan pesantren dalam memanfaatkan potensi internal juga menguatkan teori manajemen strategis Rabetino yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk merespons peluang eksternal (Rabetino et al., 2021).

Hasil wawancara dengan pengelola BLKK memberikan gambaran umum mengenai profil program yang disajikan pada Tabel.1 berikut:

Tabel 1. Profil Balai Latihan Kerja Komunitas Yayasan KH As'ad Ismail

Aspek	Keterangan
Peresmian	07 Oktober 2024
Bidang Vokasi	Desain Komunikasi Visual (DKV)
Alasan Pemilihan DKV	Relevansi masa depan, dukungan SDM internal pesantren, dan orientasi pada industri kreatif digital
Sumber Pendanaan	Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Kurikulum	Fokus pada penguasaan Corel Draw
Standar Kelulusan	Penguasaan materi, proyek akhir, serta sertifikat dari BLKK dan Kemnaker
Peserta Angkatan Pertama	16 orang (santri & masyarakat sekitar), durasi pelatihan 1 bulan (260 jam)
Benefit	Uang saku, seragam, konsumsi, modul, serta fasilitas pelatihan
Fasilitas	Laboratorium komputer, kamera, printer, proyektor

Implementasi kebijakan pendidikan vokasi di BLKK diwujudkan melalui kurikulum yang fokus pada penguasaan perangkat lunak Corel Draw sebagai kompetensi inti dalam desain grafis. Pelatihan ini dilaksanakan selama satu bulan (260 jam) sesuai standar pusat, diikuti oleh 16 peserta dari santri dan masyarakat sekitar. Peserta diwajibkan menyelesaikan proyek akhir sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan dua sertifikat (internal BLKK dan Kemnaker). Sertifikasi ini memperkuat daya saing lulusan, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia (2022) yang menegaskan pentingnya sertifikasi dalam meningkatkan pengakuan kompetensi. Temuan ini mendukung hasil penelitian Yuliani Fitri et al., bahwa vokasi terstruktur dengan sertifikasi industri efektif mencetak lulusan siap kerja (Fitri et al., 2024).

Program ini juga memberikan berbagai manfaat, antara lain uang saku, seragam, konsumsi, modul, serta akses fasilitas yang lengkap. Fasilitas memadai meningkatkan motivasi peserta, sebagaimana dikemukakan Dahalan et al. bahwa sarana belajar yang baik memperkuat keterlibatan peserta dalam pembelajaran vokasi (Dahalan et al., 2024). Dukungan insentif finansial juga sejalan dengan pandangan Restu Ayu Susianita yang menegaskan bahwa bantuan ekonomi dapat mengurangi hambatan partisipasi dalam pelatihan (Susianita et al., 2024).

Selain itu, BLKK merencanakan strategi pengembangan ke depan melalui perluasan jaringan kerja dan pemanfaatan produk jasa desain untuk pasar regional hingga nasional. Kemitraan dengan SMK, percetakan, dan stakeholder industri menjadi langkah penting dalam mendukung distribusi lulusan. Hal ini selaras dengan Hilyatin dan Mohsen yang menekankan bahwa penguatan vokasi membutuhkan kemitraan industri, penerapan standar nasional, serta peningkatan kompetensi pendidik (Hilyatin, 2020; Mohsen et al., 2022).

Namun, dalam implementasinya, BLKK menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi program. Permasalahan ini dirangkum dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Matriks Permasalahan, Dampak, dan Strategi Penguatan BLKK Yayasan KH As'ad Ismail

Permasalahan	Dampak terhadap Program	Strategi Penguatan
Pendanaan operasional kurang memadai	Kegiatan pengembangan terbatas, pemeliharaan fasilitas tidak optimal	Mengupayakan pendanaan alternatif, menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, serta efisiensi penggunaan anggaran.
Lemahnya monitoring dari pusat dan minimnya forum antar-BLKK	Evaluasi program tidak maksimal, sulit berbagi <i>best practice</i> antar-BLKK	Memperkuat koordinasi dengan Kemnaker dan membentuk forum komunikasi aktif antar-BLKK.
Struktur pengelolaan belum rapi, banyak pengurus merangkap tugas pondok	Manajemen tidak fokus, implementasi kebijakan terhambat	Melakukan restrukturisasi organisasi BLKK, memisahkan peran pengurus, serta menambah tim khusus manajemen.
Keaktifan peserta menurun di pertengahan pelatihan	Tingkat kelulusan menurun, tujuan pelatihan tidak tercapai maksimal	Seleksi peserta lebih ketat, pemberian motivasi dan insentif tambahan, serta monitoring kehadiran secara ketat.
Pemeliharaan fasilitas tidak sesuai prosedur	Fasilitas cepat rusak, kualitas pelatihan menurun	Menerapkan SOP pemeliharaan, memberikan pelatihan penggunaan fasilitas, dan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas.
Kesulitan monitoring peserta magang	Evaluasi hasil magang tidak akurat, sulit menindaklanjuti peserta	Mengembangkan sistem pelaporan online, menugaskan mentor lapangan, dan memperkuat koordinasi dengan mitra magang.
SDM instruktur membutuhkan upgrading skill dan penambahan tenaga pengajar	Materi pelatihan kurang update, kualitas pengajaran berkurang	Menyelenggarakan pelatihan upgrading skill instruktur serta merekrut tenaga pengajar tambahan sesuai kebutuhan.

Permasalahan tersebut sesuai dengan temuan yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan vokasi sering terhambat oleh lemahnya manajemen dan minimnya dukungan sistemik (Utomo, 2021). Situasi ini menegaskan perlunya perbaikan struktur pengelolaan dan penguatan kapasitas SDM. Teori kepemimpinan distribusi Shabalala juga relevan di sini, karena keberhasilan program pendidikan memerlukan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pengelola inti (Shabalala, 2025).

Selain masalah yang ada, terdapat sejumlah tantangan dan peluang strategis yang harus dihadapi BLKK ke depan. Selain menghadapi sejumlah permasalahan internal, Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Yayasan KH As'ad Ismail juga dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi dalam upaya pengembangannya di masa mendatang. Tantangan pertama adalah kebutuhan untuk melakukan penataan ulang kepengurusan serta penambahan sumber daya manusia pada bidang pemeliharaan dan pemasaran. Restrukturisasi organisasi ini dipandang penting agar pengelolaan BLKK dapat berjalan lebih fokus, efektif, dan profesional.

Selanjutnya, seleksi peserta pelatihan perlu dilaksanakan secara lebih ketat untuk memastikan hanya individu yang memiliki motivasi dan komitmen belajar tinggi yang dapat mengikuti program. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan sekaligus meminimalkan tingkat ketidakhadiran peserta selama proses pelatihan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan fasilitas BLKK, tidak hanya terbatas pada kegiatan pelatihan internal, tetapi juga dapat diakses oleh pihak eksternal seperti sekolah atau lembaga sekitar. Pemanfaatan ini selain

memperluas fungsi sosial BLKK, juga dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan operasional lembaga. Selain itu, BLKK memiliki peluang strategis untuk mengembangkan produk berbasis jasa desain, toko daring, dan pembuatan website dengan sasaran pemasaran berskala regional hingga nasional. Pengembangan ini memerlukan dukungan strategi promosi yang tepat serta inovasi berkelanjutan agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kompetensi instruktur melalui program peningkatan keterampilan (*upgrading skill*) yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pelatihan berkelanjutan dan kerja sama dengan praktisi industri kreatif, sehingga kualitas pembelajaran meningkat dan BLKK mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dalam menghadapi tantangan era digital.

Tantangan ini membuka peluang besar bagi BLKK untuk memperkuat posisinya sebagai pusat pelatihan kreatif berbasis pesantren. Hal ini sejalan dengan Deissinger dan Gonon yang menegaskan bahwa keberhasilan sistem vokasi tidak hanya bergantung pada kurikulum (Deissinger & Gonon, 2021), tetapi juga pada legitimasi kelembagaan dan kemampuan beradaptasi dengan era industri 4.0 (Meditama, 2021). Selain itu, strategi pengembangan produk kreatif BLKK memperkuat argumen Rifa Komsatun bahwa pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi berbasis keterampilan (Rifa, 2023).

Hasil penelitian ini memperlihatkan keterkaitan yang kuat dengan berbagai temuan studi terdahulu mengenai implementasi pendidikan vokasi. Penyelenggaraan program BLKK di Pondok Pesantren Miftahul Ulum mendukung hasil penelitian Dahalan yang menegaskan bahwa penyediaan fasilitas pelatihan yang memadai mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta secara signifikan (Dahalan et al., 2024). Selanjutnya, temuan ini juga memperkuat kajian Tian yang menunjukkan bahwa pendidikan vokasi telah berkembang menjadi bidang interdisipliner, menggabungkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, dan pedagogi untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan modern (Tian et al., 2023). Lebih jauh, penelitian ini mengonfirmasi pandangan Yuliani Fitri mengenai urgensi perencanaan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan dapat memiliki keterampilan relevan dan siap bersaing di dunia kerja (Fitri et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi implementasi pendidikan vokasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Gondanglegi, Malang diwujudkan melalui pendirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) yang difokuskan pada program Desain Komunikasi Visual (DKV). Keputusan ini diambil secara strategis karena DKV dinilai sebagai vokasi yang relevan dan memiliki orientasi masa depan. Selain itu, pemilihan ini selaras dengan sumber daya manusia yang ada di pesantren, mengingat ketersediaan SDM desainer yang kompeten di internal pondok. Dalam pelaksanaannya, kurikulum pelatihan berfokus pada pendalaman Corel Draw, dan peserta dinilai berdasarkan penguasaan materi serta kemampuan menyelesaikan proyek akhir.

Meskipun memiliki strategi implementasi yang terencana, BLK ini masih menghadapi beberapa tantangan operasional dan struktural. Kendala utama meliputi pendanaan operasional yang kurang memadai dan minimnya monitoring dari atasan atau pusat. Terdapat pula masalah dalam pengelolaan struktural, di mana tugas pengelola masih terbagi dengan urusan pondok, serta masalah keaktifan peserta yang cenderung menurun di pertengahan pelatihan.

Menanggapi hal tersebut, pengelola memiliki visi untuk merapikan kepengurusan dan menambah SDM di bidang pemasaran produk dan pemeliharaan.

Selain itu, BLK berencana untuk menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, seperti SMK terdekat, sebagai strategi untuk menyalurkan lulusan ke dunia kerja. Tujuan dan harapan jangka panjangnya adalah agar produk BLK, termasuk jasa desain dan website, dapat lebih dikenal secara masif di pasar regional maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., & Putra, D. P. (2022). Peran Balai Latihan Kerja Komunitas Dalam Meningkatkan Keterampilan Santri Di Bidang Desain Grafis. *Al-Mutsla*, 4(2), 218–236. <https://doi.org/10.46870/jstain.v4i2.417>
- Ali, M., & Bahtera, M. (2024). Islam in Agricultural Islamic Boarding Schools to Promote Ecosophy (Ecological Philosophy) for Environmental Protection. *MIKHAYLA: Journal of Advanced Research*, 1(1), 36–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.61579/mikhayla.v1i1.171>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Ari, M., Fawaid, M., & Abdillah, H. (2025). Analisis Kebutuhan dan Strategi Implementasi Teaching Factory dalam Pembelajaran Pemesinan di SMK : Studi Literatur. *JIVET: Journal of Innovative Vocational Education and Technology*, 1(1), 1–11.
- Avana, N., Nerita, S., Rurisman, R., Gistituati, N., & Rusdinal, R. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi. *Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(2), 322–338. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v8i2.3559>
- Basari, D. J., Sebgag, S., Noval, S. M. R., Mudrikah, A., & Mulyanto, A. (2023). Human Resource Management Model in Islamic Boarding School-Based Private Madrasah Tsanawiyah. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 14–30. <https://doi.org/10.31538/ndh.v8i1.2884>
- Basuki, A., Susilowati, E., & Umatin, C. (2024). Literature study on problems of office management vocational school teachers in implementing learning technology. *International Education Trend Issues*, 2(2), 170–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.56442/iet.v2i2.534>
- Chuanchen, C., & Zaini, A. W. (2023). Cultivating Cultural Synergy: Unifying Boarding Schools, Local Wisdom, and Authentic Islamic Values for the Enhancement of Islamic Identity. *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 5(2), 187–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.52627/managere.v5i2.339>
- Dahalan, F., Alias, N., & Shahaarom, M. S. N. (2024). Gamification and Game Based Learning for Vocational Education and Training: A Systematic Literature Review. *Education and Information Technologies*, 29(2), 1279–1317. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11548-w>
- Deissinger, T., & Gonon, P. (2021). The development and cultural foundations of dual apprenticeships—a comparison of Germany and Switzerland. *Journal of Vocational Education and Training*, 73(2), 197–216. <https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1863451>
- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4773>
- Erlinda, V., & Noviani, L. (2021). Implementation of Vocational High School Revitalization Program in Preparing Graduate Competencies. *International*

- Journal of English Literature and Social Sciences*, 6(2), 241–250.
<https://doi.org/10.22161/ijels>
- Fahrurrosi, L., & Husni, M. (2024). Rancang Bangun Epistemologi Islam Al-Jabiri dalam Kerangka Keilmuan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Gondanglegi, Malang. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2423–2434.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3710>
- Fitri, Y., Gistituati, N., & Ananda, A. (2024). Perbandingan Sistem Pendidikan Vokasi Indonesia dengan Belanda. *Journal on Education*, 06(04), 22827–22833.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6543>
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis Pengaruh Ipm, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32696/jp2sh.v8i1.2075>
- Hidayah, S. N. (2021). Pesantren for Middle-Class Muslims in Indonesia (Between Religious Commoditication and Pious Neoliberalism). *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 9(1), 209–244.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v9i1.7641>
- Hilyatin, D. L. (2020). Pemetaan Pengembangan Potensi Vokasi Pesantrenpreneur (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto). *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 51–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i2.4271>
- Kalita, B. (2024). The role of vocational education on the development of youth. *Journal of Vocational Education and Trainingisual and Performing Arts*, 5, 1206–1211. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.301>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah: Pembangunan Gedung Workkshop dan Pemberian Peralatan Pelatihan Vokasi Balai Latihan Kerja Komunita*.
- Li, J., & Pilz, M. (2023). International transfer of vocational education and training: a literature review. *Journal of Vocational Education and Training*, 75(2), 185–218.
<https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1847566>
- Liu, H., & Paramalingam, M. (2025). Aligning Vocational Education with Emerging Industry Trend. *Journal of Neonatal Surgery*, 14(6), 360–369.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52783/jns.v14.2242>
- Maharani, W. M., Zauhar, S., Makmur, M., & Santoso, B. (2024). Understanding the Gap Between Policy and Implementation of Vocational Secondary Education to Realize Sustainable Development: The Case of East Java Province, Indonesia. *SDG: Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), 1–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2291>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(2), 324–334.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>
- Maulana, F., Nufus, A., & Natasya. (2025). Pengaruh Laju Pertumbuhan Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Jurnal Strategi Bisnis Dan Keuangan*, 6(1), 19–29.
- Maulida, V., Febrianty, A. D., Safara, M. A., Rakhasha, N. S., Purniawan, & Farliana, N. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Proporsi Ketenagakerjaan Tahun 2024. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 02(03), 1996–2002.
<https://jurnal.itc.web.id/index.php/jebd/article/view/2415>
- Meditama, R. F. (2021). Pendidikan vokasi sebagai elemen fundamental menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. *Prooceeding International Seminar on Islamic Education and Peace*, 1, 443–452.

- Miles, & Huberman. (2019). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (4th ed.). In *SAGE Publication*.
- Mohsen, M., Murtadlo, M., & Basri, H. H. (2022). Pendidikan Life Skills dan Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 20(3), 262–278. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i3.1468>
- Mufida, L. L. A., & Nasir, M. S. (2023). Analisis Dinamis Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i1.15>
- Pemerintah Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 132424, 17.
- Qian, F. (2024). Strategies for Enhancing the Information Technology Teaching Competence of Vocational Education Teachers. *International Journal of Educational Teaching and Research*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.70767/ijetr.v1i2.306>
- Rabetino, R., Kohtamäki, M., & Federico, J. S. (2021). A (Re) view of the Philosophical Foundations of Strategic Management. *Int J Manag Rev.*, July 2020, 151–190. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12244>
- Rama, A., Ambiyar, A., Lapisa, R., & Verawardina, U. (2023). Vocational technology education innovation: building a generation of experts in the digital age. *EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 1079–1097. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/1202323361>
- Rembangsupu, A., Budiman, K., Bidin, Puspita, & Rangkuti, M. Y. (2022). Studi Yuridis Tentang Jenis Dan Jalur Pendidikan Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), 91–100. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.337>
- Rifa, K. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Pesantren dalam Membudayakan Kewirausahaan Santri dan Alumni: Studi pada Program OPOP (One Pesantren One Product) di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan. In *Aleph* (Vol. 87, Issue 1,2).
- Rohdiana, F., Suhartono, & Marlina. (2023). Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Santri pada Pondok Pesantren Darussalamah. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 15–24. <https://doi.org/10.30599/jpia.v10i1.1843>
- Shabalala, N. P. (2025). Challenges , opportunities and strategies of distributed leadership in managing environmental education curriculum in South African secondary schools. *International Journal of Educational Management and Development Studies*, 6(1 March), 98–135. <https://doi.org/10.53378/ijemds.353156>
- Sharma, M., Riba, D., & Padu, A. (2024). Implementation of Vocational Education in Education System of India : Challenges and Prospects of NEP 2020. *International Journal of Scientific Research in Modern Science and Technology*, 3(7), 1–10.
- Sofiyanti, F., & Pramono, S. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Farida Sofiyanti, Sapto Pramono. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 223–230.
- Suriagiri, S., & Assyauqi, M. I. (2023). Strategi Manajemen Pendidikan Keberlanjutan Pada Pendidikan Vokasional. *Al Washliyah: Jurnal Penelitian Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 129–139. <https://doi.org/10.70943/jsh.v1i2.60>
- Susianita, Ayu, R., & Riani, L. P. (2024). Pendidikan Sebagai Kunci Utama Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Ke Dunia Kerja Di Era Globalisasi. *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 1–12.
- Tian, Y., Liu, J., Xu, X., & Wu, X. (2023). Knowledge mapping of vocational

- education and training research (2004–2020): a visual analysis based on CiteSpace. *Scientific Reports*, 13(1), 22348. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-49636-7>
- Utomo, W. (2021). Paradigma Pendidikan Vokasi: Tantangan, Harapan Dan Kenyataan. *Almufi Journal of Measurement, Assessment, and Evaluation Education*, 1(2), 65–72.